



LAPORAN AKHIR

STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS INDIKATOR MAKRO PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

**KERJASAMA
BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG**

DAN

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
OKTOBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Strategi Perencanaan Pembangunan Berbasis Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022

1. Perguruan Tinggi Pengusul : Universitas Lambung Mangkurat
2. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Muzdalifah, SE, M.Si
 - b. NIP/NIDN : 197204101997022003/ 0010047205
 - c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
 - d. Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Pembangunan/ FEB
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
 - f. Bidang Keahlian : Ekonomi Pembangunan
 - g. Instansi : Jln. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin
3. Anggota TIM Pengusul
 - a. Perguruan Tinggi : Dosen 5 orang
 - b. Staf Pemda/Bappeda : 2 orang
4. Lokasi Pelaksanaan :
 - a. Nama Wilayah : Kabupaten Tabalong
 - b. Kecamatan :
 - c. Provinsi : Kalimantan Selatan
5. Periode Waktu Pelaksanaa : 6 bulan
6. Biaya Total : 141. 791. 856 (Bappedalitbang Kab. Tabalong)

Mengetahui,
Ketua LPPM ULM

Banjarmasin, 20 Oktober 2022
Ketua Peneliti

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmiko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

Dr. Muzdalifah, SE, M.Si
NIP. 197204101997022003

RINGKASAN

Pencapaian sasaran target Indikator Makro Sosial-Ekonomi melibatkan penanganan secara lintas sektoral, sehingga terdapat masalah bagaimana dan lintas sektor OPD apa saja yang terlibat dalam penanganan program dan kegiatannya untuk mencapai target sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi tersebut. Perlu dilakukan identifikasi penanganan program dan kegiatan secara lintas sektor antar OPD yang bersesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang disusun dalam bentuk pendekatan *Crosscutting*.

Tujuan dari kajian implementasi perangkat aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dan penyusunan *Crosscutting* Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah: 1) menemukunkan cara dan prosedur perhitungan yang lebih cepat, tepat dan akurat tentang penentuan target Indikator Makro Sosial-Ekonomi dari tahun ke tahun secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dan 2) memperoleh gambaran yang logis dan rasional status peta pendistribusian tanggung jawab pencapaian target dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah daerah yang relevan dan tidak relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada penyusunan dokumen *Crosscutting* berdasarkan sasaran 6 Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data APBD Perubahan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan 2022 yang bersumber dari Bappedalitbang Kabupaten Tabalong. Teknik analisis yang diterapkan adalah dengan mengklasifikasikan pos-pos belanja daerah pada kelompok KEGIATAN menurut 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Hasil pengklasifikasian dimasukkan ke dalam model *Crosscutting* yang sudah memuat database APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022. Pemodelan menggunakan algoritma aplikasi Microsoft Excel 365.

Hasil kajian menunjukkan Analisis *Crosscutting* pada APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 menghasilkan temuan sekitar 40,21% - 41,01% belanja daerah terkait dengan 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi secara lintas sektor. Alokasi belanja paling besar terkait dengan sasaran indikator Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 20,69% - 24,07% dari seluruh belanja daerah. Berikutnya Pertumbuhan Ekonomi sekitar 11,17% hingga 16,12%, Kemiskinan 3,26% - 3,43%, Ketimpangan 0,31% - 1,37%, Tingkat Pengangguran Terbuka 0,11% - 0,47%, dan Inflasi 0,06% - 0,16%. Indikator Makro Sosial-Ekonomi tahun 2021 yang realisasinya belum mencapai target RPJMD perubahan dialami oleh indikator dengan sasaran alokasi belanja daerah yang kecil maupun besar. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target RPJMD adalah Inflasi dan Persentase Penduduk Miskin. Alokasi anggaran terkait kedua indikator tersebut untuk tahun 2021 sebesar 0,06% dan 3,43% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi pengeluaran terkait IPM sebanyak 24,07% tetapi belum dapat mencapai target RPJMD untuk tahun 2021.

Kata Kunci: ***Crosscutting, Indikator Makro Sosial-Ekonomi, Evidence Based Policy***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, tim dapat menyelesaikan laporan akhir Strategi Perencanaan Pembangunan Berbasis Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022. Kajian ini disusun sebagai tindak lanjut dari penerapan aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi untuk perhitungan dan proyeksi sasaran target serta penyusunan *Crosscutting*. Melalui kajian ini diharapkan dapat dipetakan secara rasional, logis perilaku kebijakan dan penganggaran dari data RPJMD dan RKPD tahun 2021 dan 2022.

Kajian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekonstruksi, reformulasi serta reduksi untuk realokasi program dan kegiatan menurut distribusi tanggung jawab antar sektor dan lintas sektor yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah di antara OPD dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk tahun 2023 dan periode-periode selanjutnya.

Dalam sasaran yang lebih luas, kajian ini diharapkan mampu menjadi pendukung dalam upaya peningkatan mutu dan kapasitas perencanaan di lingkup Bappeda Kabupaten Tabalong yang secara transparan mampu memenuhi akuntabilitas publik pertanggung jawaban penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah yang relevan dengan visi dan misi dan target yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Terlepas dari berbagai keterbatasan, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Oktober 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat	3
1.5. Lokasi Kegiatan dan Lingkup Pekerjaan	3
BAB II. STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS INDIKATOR MAKRO	4
2.1. Strategi Perencanaan Pembangunan Berbasis Data (<i>Evidence Based</i>)	4
2.2. Sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi	7
2.2.1. <i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	7
2.2.2. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	9
2.2.3. <i>Inflasi</i>	9
2.2.4. <i>Kemiskinan</i>	11
2.2.5. <i>Ketimpangan</i>	12
2.2.6. <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	14
2.3. Implementasi Strategi melalui <i>Crosscutting</i>	15
BAB III. METODOLOGI	17
3.1. Pendekatan	17
3.2. Data dan Sumber Data	17
3.3. Teknik Analisis Data	17
BAB IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	19
4.1. Pemanfaatan Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Kabupaten Tabalong	19
4.1.1. <i>Simulasi Proyeksi dan Fungsinya</i>	19
4.1.2. <i>Policy Brief</i>	21
4.2 Hasil dan Pembahasan	22

<i>4.2.1. Crosscutting Indikator Pertumbuhan Ekonomi</i>	24
<i>4.2.2. Crosscutting Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	25
<i>4.2.3. Crosscutting Indikator Inflasi</i>	26
<i>4.2.4. Crosscutting Indikator Kemiskinan</i>	28
<i>4.2.5. Crosscutting Indikator Ketimpangan</i>	29
<i>4.2.6. Crosscutting Indikator Indeks Pembangunan Manusia</i>	30
4.3. Implikasi	31
BAB V. PENUTUP	33
5.1. Simpulan	33
5.2. Rekomendasi	33
REFERENSI	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Struktur Data APBD.....	17
Gambar 4.1.	Belanja APBD Perubahan 2021 dan Alokasi Sasaran Pertumbuhan Ekonomi (Trilyun Rupiah).....	23
Gambar 4.2.	Belanja APBD Perubahan 2022 dan Alokasi Sasaran Pertumbuhan Ekonomi (Trilyun Rupiah).....	23
Gambar 4.3.	Proporsi Belanja Menurut Sasaran Indikator Makro Sosial- Ekonomi terhadap Total Belanja APBD Perubahan 2021 (%).	23
Gambar 4.4.	Proporsi Belanja Menurut Sasaran Indikator Makro Sosial- Ekonomi terhadap Total Belanja APBD Perubahan 2022 (%).	23
Gambar 4.5.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Pertumbuhan Ekonomi APBD 2021 Menurut OPD	25
Gambar 4.6.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Pertumbuhan Ekonomi APBD 2022 Menurut OPD	25
Gambar 4.7.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2021 Menurut OPD	26
Gambar 4.8.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2022 Menurut OPD	26
Gambar 4.7.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2021 Menurut OPD	26
Gambar 4.8.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2022 Menurut OPD	26
Gambar 4.9.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Inflasi APBD 2021 Menurut OPD.....	28
Gambar 4.10.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Inflasi APBD 2022 Menurut OPD.....	28
Gambar 4.11.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Kemiskinan APBD 2021 Menurut OPD	29
Gambar 4.12.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Kemiskinan APBD 2022 Menurut OPD	29
Gambar 4.13.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Ketimpangan APBD 2021 Menurut OPD	30
Gambar 4.14.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Tingkat Ketimpangan APBD 2022 Menurut OPD	30
Gambar 4.15.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Indeks Pembangunan Manusia APBD 2021 Menurut OPD	31
Gambar 4.16.	<i>Crosscutting</i> Sasaran Indeks Pembangunan Manusia APBD 2022 Menurut OPD	31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bappeda Kabupaten Tabalong telah berhasil mengembangkan Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi yang terdiri dari 9 (sembilan) macam perangkat aplikasi kalkulator yang masing-masing telah dilengkapi dengan manual serta video tutorial contoh aplikasinya. Penggunaan dan penerapan perangkat aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi telah dapat dirasakan manfaat dan fungsinya yang secara signifikan telah mempercepat dan mempermudah dalam melakukan perhitungan, prediksi, penentuan target capaian Indikator Makro Sosial-Ekonomi untuk kinerja pada tahun-tahun mendatang baik untuk RPJMD maupun RKPD Kabupaten Tabalong.

Meskipun perhitungan, prediksi dan penentuan target telah dapat dilakukan relatif lebih mudah dan lebih cepat dengan pemanfaatan aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi, namun tindak lanjut dari hal ini dirasakan menjadi kendala dalam implementasinya. Kendala utama yang dirasakan oleh Bappeda Kabupaten Tabalong adalah bagaimana mendistribusikan tanggungjawab pencapaian sasaran target Indikator Makro Sosial-Ekonomi tersebut ke seluruh OPD yang terlibat terutama menentukan OPD mana yang menjadi penanggungjawab keberhasilan pencapaian targetnya. Selain itu juga disadari bahwa pencapaian sasaran target Indikator Makro Sosial-Ekonomi hampir dipastikan melibatkan penanganan secara lintas sektoral, sehingga terdapat masalah bagaimana dan lintas sektor OPD apa saja yang terlibat dalam penanganan program dan kegiatannya untuk mencapai target sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi tersebut. Permasalahan yang kedua ini harus ditangani dengan mengidentifikasi penanganan program dan kegiatan secara lintas sektor antar OPD yang bersesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang disusun dalam bentuk pendekatan *Crosscutting*. *Crosscutting* diperlukan untuk menunjukkan apakah penanganan program dan kegiatan sudah selaras dengan visi dan misi yang harus diemban oleh Bupati selaku pimpinan pemerintah daerah.

Secara metodologi, penyusunan *Crosscutting* hanya dapat didasarkan pada basis data penganggaran dalam RPJMD dan RKPD tahun 2021 dan 2022 yang sudah berjalan

dan sudah mendapat persetujuan dari semua pemangku kepentingan terutama pihak DPRD dan Bupati selaku pimpinan daerah. Berdasarkan basis data tahun 2021 dan 2022 akan dapat disusun *Crosscutting* yang bersesuaian antara program dan kegiatan sesuai kategorinya, dan akan ditemukan juga program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat bermanfaat untuk melakukan refleksi dan dapat diketahui sejauh mana penganggaran program dan kegiatan yang relevan dan tidak relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah, yang lebih lanjut dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Hasil *Crosscutting* dapat menjadi dasar landasan pijak dalam melakukan elaborasi distribusi tanggung jawab dan alokasi anggaran yang relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah di antara OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Selain itu yang lebih urgen adalah dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dan refleksi pendistribusian program dan kegiatan antar sektor dan lintas sektor yang telah dialami pada tahun 2021 dan 2022, dan menjadi dasar untuk merekonstruksi dan mereformulasi, serta mereduksi untuk realokasi program dan kegiatan menurut rancangan distribusi tanggung jawab dan alokasi anggaran untuk pencapaian target tahun 2023 dan periode-periode selanjutnya secara lebih rasional, proporsional dan selaras dengan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

1.2. Maksud

Kajian penerapan aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi untuk perhitungan dan proyeksi sasaran target serta penyusunan *Crosscutting* ditujukan untuk memperoleh: (1) pemetaan secara rasional, logis perilaku kebijakan dan penganggaran dari data RPJMD dan RKPD tahun 2021 dan 2022, dan (2) dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekonstruksi, reformulasi serta reduksi untuk realokasi program dan kegiatan menurut distribusi tanggung jawab antar sektor dan lintas sektor yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah di antara OPD dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk tahun 2023 dan periode-periode selanjutnya.

1.3. Tujuan

Kajian implementasi perangkat aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dan penyusunan *Crosscutting* memiliki tujuan:

- a. Menemutunjukkan cara dan prosedur perhitungan yang lebih cepat, tepat dan akuntabel tentang penentuan target Indikator Makro Sosial-Ekonomi dari tahun ke tahun secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- b. Memperoleh gambaran yang logis dan rasional status peta pendistribusian tanggung jawab pencapaian target dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah daerah yang relevan dan tidak relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari tujuan yang dicapai dari hasil implementasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dan penyusunan *Crosscutting* adalah untuk meningkatkan mutu dan kapasitas perencanaan di lingkup Bappeda Kabupaten Tabalong yang secara transparan mampu memenuhi akuntabilitas publik pertanggung jawaban penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah yang relevan dengan visi dan misi dan target yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.5. Lokasi Kegiatan dan Lingkup Pekerjaan

Lokasi kegiatan dilakukan di Bappeda Kabupaten Tabalong dengan lingkup pekerjaan meliputi penerapan kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dan penyusunan *Crosscutting* dengan basis data RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2021 dan 2022.

BAB II. STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS INDIKATOR MAKRO

2.1. Strategi Perencanaan Pembangunan Berbasis Data (*Evidence Based*)

Perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjoyo (1995) adalah sebuah usaha perubahan dari suatu kondisi kemasyarakatan tertentu ke suatu kondisi kemasyarakatan yg dianggap lebih baik (lebih diinginkan), sebagai suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan. perencanaan memiliki 5 arti penting yaitu:

- a. Pengarahan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Dapat membuat perkiraan (*forecasting*) terhadap potensi-potensi, prospek perkembangan, hambatan-hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi.
- c. Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik (*the best alternative*) dan kombinasi terbaik (*the best combination*).
- d. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Ada alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi (*control/evaluation*).

Pentingnya peran perencanaan pembangunan ini memerlukan adanya dukungan data yang dapat dipercaya agar dapat dijadikan sebagai acuan, dan untuk pencapaian target yang ditetapkan dalam perencanaan diperlukan adanya strategi agar tujuan pemebangunan dapat tercapai.

Strategi perencanaan pembangunan berbasis data (*evidence based*) adalah merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dibuat berdasarkan kondisi dan kenyataan (bukti) yang dialami/dicapai oleh daerah sepanjang waktu yang telah dilalui (*historis data*). Istilah dari kondisi ini disebut sebagai *Evidence Based Policy* (EBP) atau pengambilan kebijakan berbasis bukti/fakta merupakan sebuah proses pengambilan kebijakan yang berbasis kepada bukti. Ini merupakan lawan dari pengambilan kebijakan yang hanya berlandaskan kepada preferensi pribadi yang cenderung emosional, berjangka pendek, berbasis pengalaman lampau, apalagi hanya untuk menyenangkan atasan.

Pengertian *Evidence-Based Policy* (EBP) yang diambil dari berbagai sumber dengan berbagai perspektif seperti menurut LAN (2015), EBP adalah kebijakan yang

diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta. Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), EBP merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Konsep ini mengidentifikasi apa yang berhasil, menyoroti kesenjangan di mana bukti efektivitas program kurang, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menggunakan bukti dalam anggaran dan keputusan kebijakan, dan bergantung pada sistem untuk memantau implementasi dan mengukur hasil kunci, menggunakan informasi untuk terus meningkatkan kinerja program. Menurut Sutcliffe dan Court (2005), EBP merupakan serangkaian metode yang menginformasikan proses kebijakan yang tidak bertujuan untuk secara langsung mempengaruhi tujuan akhir kebijakan tersebut. Konsep ini menganjurkan pendekatan yang lebih rasional, ketat dan sistematis. Pengambilan EBP didasarkan pada premis bahwa keputusan kebijakan harus mendapat informasi lebih baik dari bukti yang ada dan harus mencakup analisis rasional. Hal ini karena kebijakan yang didasarkan pada bukti sistematis dianggap menghasilkan hasil yang lebih baik.

Prinsip Dasar *Evidence Based Policy* (EBP) yaitu:

a. *Decisions are based on evidence and not made by evidence*

Based on berbeda dengan *made by*, berlandaskan dengan didikte oleh data adalah berbeda. Data bukti penting, namun kearifan menterjemahkan data juga penting. Karena data yang telah diolah untuk menjadi bukti tetap harus diterjemahkan secara subyektif. Seperti pada konsep sasaran yang sudah kita bahas, jika kita hanya berlandaskan data yang berasal dari masa lampau, tanpa menambahkan pemahaman terhadap waktu dan perubahan, maka kita tidak berpikir bahwa sasaran itu juga bergerak ketika perubahan terjadi. karena kebijakan tetaplah subyektif, tergantung kepada kepentingan terhadap dampak dari kebijakan. Kepentingan ini memaksa keberpihakan kepada suatu perspektif dibandingkan perspektif lain. Perspektif berbeda akan membuat cara membaca data yang sama berbeda. Data yang sama, jika dibaca berbeda, akan berujung ke kesimpulan yang berbeda pula. Ini berarti EBPM tetap memiliki kelemahan subyektif, namun tetap lebih baik dari total subyektivitas karena paling tidak masih berdasarkan bukti data, tidak asumsi apalagi imajinasi.

b. *Clear common goals that the policy should or must be achieved*

Tujuan yang jelas dan disepakati menjadi basis dalam melakukan relevansi, seleksi, dan evaluasi diri. Seringkali tujuan yang tidak terdefinisi secara jelas menimbulkan multi-interpretasi sehingga bisa saling mengklaim bahwa tujuan telah tercapai atau tidak tercapai. Tujuan yang jelas memiliki sasaran kuantitatif yang jelas, sasaran yang jelas adalah sasaran yg baik dan disepakati bersama. Sasaran yang baik memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Action-oriented, Relevant and Time-Bound*). Tujuan harus disepakati bersama, ini yang lebih susah, namun tidak mustahil. Karena sepakat itu bisa beberapa tingkat, dari kesepakatan logika dan kesepakatan persetujuan, dari sementara maupun permanen.

c. *The evidence must be seen in a context*

Bukti dalam EBP harus dilihat dalam konteksnya. Konteks didefinisikan sebagai lingkungan dimana data yang dikumpulkan, asumsi yang diberikan, proses pengolahan yang dilakukan, kesimpulan yang diambil, serta rekomendasi yang diberikan yang bisa memberikan pengaruh. Karena pengaruhnya maka banyak inilah, ada yang memiliki istilah: *Context is King*. *Context is king* karena aspek lingkungan seperti waktu, lokasi, dan aktor akan membuat sebuah bukti relevan atau tidak relevan. Waktu misalnya, ketika memasuki tahun politik, maka biasanya segala komentar dan kelakuan dari para aktor politik akan bisa dipahami dari keinginannya untuk menang. (Walaupun sekarang semua tahun adalah tahun politik). Lokasi misalnya, bukti yang berlaku di negara lain, belum tentu berlaku di negara kita. Aktor misalnya, kita cenderung memberikan bobot lebih tinggi kepada bukti yang berasal dari lembaga resmi atau orang yang kita percayai, dibandingkan dengan orang yang baru kita kenal.

Manfaat EBP secara umum mencakup:

- a. EBP menjadi dasar dalam melakukan proses umpan balik pembelajaran dalam mengembangkan kebijakan (*policy learning*). Proses umpan balik membutuhkan dasar, dan data *evidence* menjadi dasar yang obyektif untuk melihat apakah ada kesalahan dalam mengolah data, menginterpretasikan data atau menyajikan data sehingga kesimpulan yang diambil tepat atau tidak sesuai.

- b. EBP juga menjadi perpustakaan dinamis yang menjadi ingatan institusi (*institutional memory*). Proses EBP biasanya terdokumentasi karena dimulai dari data yang dikumpulkan. Proses EBP juga membutuhkan diskusi dalam penyamaan persepsi dan pembangunan konsensus dalam menentukan kebijakan. Dua proses utama ini, dokumentasi dan diskusi, akan meninggalkan jejak pengetahuan baik secara tulisan maupun secara ingatan di pelaku di organisasi.
- c. Mendisiplinkan organisasi untuk mengumpulkan data bukti (*evidence*) yang relevan. Dengan membuat data menjadi kebutuhan dalam mengambil keputusan, maka organisasi akan selalu didorong untuk mengupdate data secara rutin dan menambahkan data baru yang dibutuhkan. Pengumpulan data memang membutuhkan biaya, namun biaya ini akan digantikan oleh kualitas dari pengambilan kebijakan dan terhindar dari kesalahan yang bisa terjadi, dan biaya memperbaiki kesalahan itu menjadi lebih mahal dari kesalahannya.

2.2. Sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam chapter 21 buku Samuelson tentang pertumbuhan pendapatan nasional yang bisa kita adopsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah, melalui terjadinya peningkatan atau pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan atau peningkatan dari PDRB itu disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor seperti perubahan ketersediaan sumber daya atau resource dan adanya peningkatan produktivitas sebagai akibat dari efisiensi penggunaan resource.

Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda di dalam perhitungan pendapatan daerah ini dilakukan dua hal berikut ini yang pertama hanya memasukkan nilai produk akhir yang dihasilkan dan dijual untuk dikonsumsi dan investasi atau nilai penjualan dan bukan produk antara yang kedua hanya memperhitungkan total *earning* atau sebagai akibat penjumlahan dari nilai tambah atau *value added* di seluruh tahapan produksi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Teori Neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. teori ini juga menyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Teori Klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18 Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur. konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja.

Teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi diantaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Frederich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis.

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam focus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya. Indikator pertumbuhan

ekonomi sendiri dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu indikator lainnya adalah pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif.

2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk. Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

2.2.3. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Berdasarkan the *Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, Data pengelompokan tersebut didapatkan melalui Survei Biaya Hidup (SBH), yaitu:

- a. Bahan Makanan.
- b. Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau.
- c. Perumahan.
- d. Sandang.
- e. Kesehatan.
- f. Pendidikan dan Olahraga.
- g. Transportasi dan Komunikasi.

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

- a. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 1. Interaksi permintaan-penawaran.
 2. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
 3. Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
- b. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:
 1. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

2. Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (*Administered Prices*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

2.2.4. Kemiskinan

Secara umum, pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021a).

- a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan kemiskinan adalah tentang Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal lainnya terkait kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin merata pada suatu kondisi tertentu yaitu di P1 yang cukup dalam indikasinya maka kondisi kemiskinan relatif merata pada kedalaman yang sama dengan kata lain makin banyak penduduk yang berada di level kemiskinan tertentu/terkelompok dan untuk ini diperlukan upaya yang serius.

2.2.5. Ketimpangan

IPM menurut BPS Pusat Jakarta (2021) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM Diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Bagi Indonesia, IPM merupakan data

strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan; Standar hidup layak (BPS Pusat Jakarta, 2021), Untuk indeks standar hidup layak (kesejahteraan) mengacu pada penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok dengan batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sampai tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).

Indikator pembentuk IPM untuk komponen Pendidikan adalah Rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka HLS, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indikator pembentuk IPM untuk komponen pendidikan yang lain adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Indikator pembangunan bidang Kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang tergabung dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pemerintah bidang kesehatan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk. AHH atau *life expectancy at birth* adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi baru lahir (Sugiantari dan Budiantara, 2013; Maryani dan Kristiana, 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi AHH adalah data angka kematian bayi (AKB) dan Age Spesific Death rate (ASDR). Adanya kematian bayi dan kematian pada beberapa kategori usia menyebabkan AHH kota Banjarmasin tidak meningkat optimal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ASI eksklusif, rumah tangga dengan jamban sehat, masyarakat dengan jaminan kesehatan, jumlah penduduk yang rawat inap,

capaian imunisasi dasar, dan pelayanan kesehatan (Ardianti dkk., 2015). Indikator Kesehatan lainnya yang mempengaruhi status Kesehatan anak dan siklus hidup adalah prevalensi stunting.

2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menurut BPS Pusat Jakarta (2021) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan; Standar hidup layak (BPS Pusat Jakarta, 2021), Untuk indeks standar hidup layak (kesejahteraan) mengacu pada penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok dengan batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sampai tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).

Indikator pembentuk IPM untuk komponen Pendidikan adalah Rata-rata Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka HLS, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indikator pembentuk IPM untuk komponen Pendidikan yang lain adalah Rata-rata lama sekolah (RLS). RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Indikator pembangunan bidang Kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang tergabung dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH dapat

digunakan sebagai evaluasi kinerja pemerintah bidang kesehatan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk. AHH atau *life expectancy at birth* adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi baru lahir (Sugiantari dan Budiantara, 2013; Maryani dan Kristiana, 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi AHH adalah data angka kematian bayi (AKB) dan Age Spesific Death rate (ASDR). Adanya kematian bayi dan kematian pada beberapa kategori usia menyebabkan AHH kota Banjarmasin tidak meningkat optimal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ASI eksklusif, rumah tangga dengan jamban sehat, masyarakat dengan jaminan kesehatan, jumlah penduduk yang rawat inap, capaian imunisasi dasar, dan pelayanan kesehatan (Ardianti dkk., 2015). Indikator Kesehatan lainnya yang mempengaruhi status Kesehatan anak dan siklus hidup adalah prevalensi stunting.

2.3. Implementasi Strategi melalui *Crosscutting*

Crosscutting dalam keuangan adalah cara baru untuk mengalokasikan anggaran, terutama di pemerintahan. Pendanaan dan layanan didasarkan pada daerah, bukan berdasarkan instansi. *Crosscutting* berfokus pada identifikasi dan menghilangkan duplikasi sumber daya dan layanan yang tidak perlu dalam area yang ditentukan. Jadi *Crosscutting* melibatkan melihat melampaui satu instansi tertentu dengan keterkaitan antar instansi. Tujuannya adalah efisiensi, penghematan waktu/sumber daya/uang, dan peningkatan dalam layanan (Anonim, 2022). *Crosscutting* bermanfaat untuk membangun koordinasi antar departemen terutama dalam mengeksplorasi pilihan untuk meningkatkan efektivitas biaya di suatu Lembaga (Anonim, 2022).

Dalam perspektif yang lebih luas, *Crosscutting* anggaran ketika dikaitkan dengan OPD (Cross-departmental budgets) akan menjadi efektif ketika: 1) Tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan disepakati, 2) adanya dukungan politik tingkat tinggi, 3) adanya dukungan pejabat senior, 4) adanya komitmen orang-orang kunci di instansi atau departemen yang perlu bekerja sama, dan 5) alokasi sumber daya waktu, uang, dan kapasitas yang memadai (Connell, 2019).

Implementasi *Crosscutting* anggaran pada instansi pemerintah di Indonesia dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja; b. menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*); c. menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; d. merumuskan indikator kinerja; dan e. menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Kegiatan *Crosscutting* secara implisit disebutkan pada tahapan ketiga terkait identifikasi kemungkinan adanya *outcome* antara yang menjadi kinerja organisasi lain (*crosscutting*), yang secara detail menyebutkan:

“Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome*/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome* final. Jika hal ini ditemukan ketika penyusunan, instansi pemerintah tidak boleh mengeliminasi kondisi antara tersebut dan tetap harus menjadi bagian dari sebuah pohon kinerja. Namun demikian, instansi pemerintah perlu mengidentifikasi dan menandai kondisi tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan secara lebih lanjut”.

Berbagai upaya dilakukan oleh instansi pemerintah untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya kolaborasi dan integrasi antar-OPD dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan permasalahan pembangunan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Hal ini dikarenakan dalam SAKIP terdapat *Crosscutting* anggaran, sehingga semua OPD harus dapat berkolaborasi, berintegrasi, dan bersinergi.

BAB III. METODOLOGI

3.1. Pendekatan

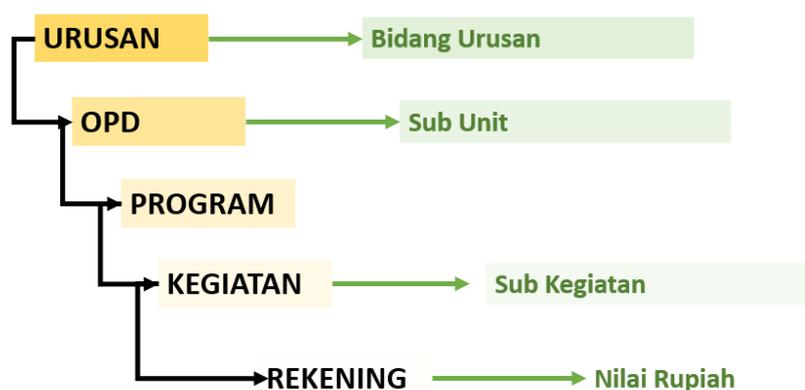
Penyusunan dokumen *Crosscutting* Kabupaten Tabalong dilakukan untuk mengetahui bagaimana alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 berdasarkan sasaran 6 Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Ke-6 indikator yang dimaksud meliputi indikator (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Tingkat Pengangguran Terbuka, (3) Inflasi, (4) Kemiskinan, (5) Ketimpangan dan (6) Indeks Pembangunan Manusia. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data APBD perubahan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan 2022. Sumber data tersebut berasal dari Bappedalitbang Kabupaten Tabalong.

3.3. Teknik Analisis Data

Data APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 diolah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 365. Teknik analisis yang diterapkan adalah dengan mengklasifikasikan pos-pos belanja daerah pada kelompok KEGIATAN menurut 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi.



Gambar 3. 1. Struktur Data APBD

Teknik pengklasifikasian pos KEGIATAN tersebut dilakukan dengan acuan nama kelompok kegiatan memiliki kaitan secara langsung pada salah satu indikator dari 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Jika tidak memiliki kaitan langsung maka suatu pos KEGIATAN tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi.

Hasil pengklasifikasian pos KELOMPOK tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model *Crosscutting* yang sudah memuat database APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022. Pemodelan menggunakan algoritma aplikasi Microsoft Excel 365. Berdasarkan model tersebut dapat dibuat tabel alokasi belanja daerah APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 secara lintas sektoral dengan mengacu pada ke-6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Analisis *Crosscutting* yang digunakan adalah berapa jumlah belanja daerah dalam rupiah dan nilai proporsi belanja daerah tersebut dalam satuan persen yang dialokasikan menurut 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi berdasarkan kelompok Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemanfaatan Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Kabupaten Tabalong

Tersedianya sarana perangkat Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi memberi peluang untuk meningkatkan mutu kinerja perencanaan di Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, dengan catatan bahwa pemanfaatannya harus didukung oleh kapasitas dari pengguna dalam hal penguasaan keterampilan dan profisiensi tentang pemahaman isi, konteks dan cakupan serta tujuan utama dari pemanfaatan perangkat Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi masing-masing. Simulasi proyeksi atas pemanfaatan dari masing-masing perangkat tersebut dapat disimak pada bagian 4.1.1. berikut:

4.1.1. Simulasi Proyeksi dan Fungsinya

a. Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi

Aplikasi Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi memiliki fungsi untuk memproyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2030. Data yang ditampilkan berupa grafik perkembangan, rerata pertumbuhan hingga batas atas dan batas bawah hasil proyeksi.

b. Kalkulator Simulasi PDRB

Aplikasi Kalkulator Simulasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan aplikasi simulasi untuk mencapai target nilai indikator dari PDRB Lapangan Usaha yang terdiri dari 11 sektor perekonomian dan PDRB Pengeluaran di Kabupaten Tabalong. Aplikasi ini berisikan informasi data historis dan kondisi terkini nilai PDRB di Kabupaten Tabalong yang dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai basis data acuan perhitungan statistik.

c. Kalkulator Simulasi Analisis Ekonomi Regional

Kalkulator Simulasi Analisis Ekonomi Regional merupakan aplikasi untuk melakukan analisis terhadap pertumbuhan Ekonomi dari 11 (sebelas) sektor PDRB di Kabupaten Tabalong. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode yaitu Analisis Shift-Share, Location Quotient, dan Tipologi Klasen.

d. Kalkulator Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang (PPEJP)

Aplikasi Kalkulator Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang (PPEJP) merupakan aplikasi simulasi untuk memproyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Tabalong. Aplikasi berisikan informasi data historis dan kondisi terkini nilai PDRB di Kabupaten Tabalong yang dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari tahun 2001 hingga tahun 2021 sebagai basis data acuan perhitungan statistik sehingga dapat dilakukan proyeksi hingga tahun 2050. Hasil proyeksi pertumbuhan PDRB menghasilkan nilai PDRB harga konstan dalam satuan trilyun rupiah.

e. Kalkulator Simulasi Inflasi

Aplikasi Kalkulator Simulasi Aplikasi Inflasi merupakan aplikasi simulasi untuk menggambarkan kondisi trend inflasi di Kabupaten Tabalong untuk kurun waktu tertentu.

f. Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Aplikasi Kalkulator Simulasi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan aplikasi simulasi untuk mencapai target nilai indikator dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Aplikasi ini berisikan informasi data historis dan kondisi terkini TPT, AK dan BAK di Kabupaten Tabalong yang dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai basis data acuan perhitungan statistik.

g. Kalkulator Simulasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Aplikasi Kalkulator Simulasi Kemiskinan dan Ketimpangan merupakan aplikasi simulasi untuk memproyeksi indikator pembangun kemiskinan seperti Garis Kemiskinan, Ketimpangan, Persentase Penduduk Miskin, Ketimpangan, dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

h. Kalkulator Simulasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aplikasi Kalkulator Simulasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan aplikasi simulasi untuk mencapai target yang ada di dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2022 – 2026. IPM dibentuk dari 3 indikator yakni indeks Kesehatan, indeks Pendidikan, dan indeks Kesejahteraan. Indeks Kesehatan dibentuk dari Angka Harapan Hidup (AHH), indeks Pendidikan dibentuk dari

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); sementara indeks Kesejahteraan dibentuk dari Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Tabalong.

i. Kalkulator Simulasi *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Kalkulator simulasi AHP memiliki fungsi untuk melakukan perbandingan terhadap kriteria yang ingin diuji berdasarkan input dari pendapat responden. Melalui metode AHP dimungkinkan untuk mengevaluasi kepentingan kriteria secara berpasangan sehingga didapatkan keputusan urutan bobot yang terukur. Kalkulator AHP ini dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang terbaik berdasarkan pendapat sample responden yang diambil dari populasi pemangku kepentingan yang mendapat layanan manfaat (*beneficiary user*) dari sehimpunan kebijakan yang telah diputuskan oleh unit OPD tertentu.

4.1.2. Policy Brief

Pemanfaatan simulasi Kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dapat digunakan untuk melakukan kajian dan analisis tentang proyeksi angka-angka Indikator Makro Sosial-Ekonomi sesuai yang ditargetkan berdasarkan data historis yang dimiliki oleh masing-masing OPD yang relevan untuk kurun waktu tertentu. Dari simulasi tersebut dapat dikaji faktor-faktor penentu yang dapat diintervensi untuk memacu pencapaian target Indikator Makro Sosial-Ekonomi yang diharapkan berdasarkan perilaku dan peristiwa dan data yang telah dialami (*evidence-based policy*) selama kurun waktu sebelum, saat ini dan proyeksi akan datang yang lebih realistis secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Hasil analisis dan kajian tersebut tertuang masing-masing dalam Policy Brief dengan topik-topik berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong)
- b. Analisis Ekonomi Regional
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (Lapangan Kerja Baru untuk Target Tingkat Pengangguran Terbuka RPJMD Kabupaten Tabalong 2022-2024)
- d. Inflasi
- e. Kemiskinan dan Ketimpangan (Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Kabupaten Tabalong 2022-2024)

- f. IPM Pendidikan
- g. IPM Kesehatan
- h. IPM Kesejahteraan

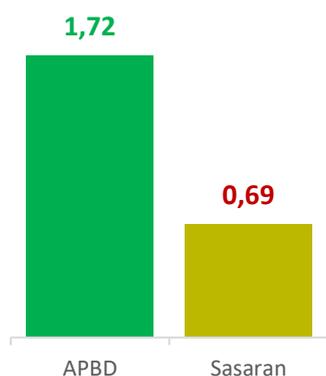
4.2 Hasil dan Pembahasan

Crosscutting APBD tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Tabalong merupakan gambaran bagaimana alokasi belanja Pemerintah Daerah berdasarkan 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi secara lintas sektoral. Pengertian dari pernyataan tersebut adalah untuk mencapai target Indikator Makro Sosial-Ekonomi seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diperlukan kebijakan yang diimplimentasikan ke dalam anggaran. Yaitu pos-pos apa yang dimasukkan secara lintas sektoral dan berapa besar belanja yang dialokasikan untuk mencapai sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi.

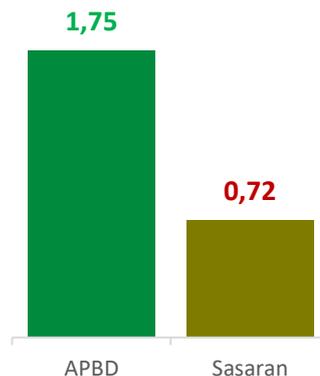
Lintas sektoral artinya beban tanggung jawab untuk mencapai sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi diberikan kepada lebih dari satu sektor atau tidak hanya pada satu OPD saja. Sepanjang program dan kegiatan OPD sesuai tupoksi-nya masih memiliki relevansi dengan sasaran indikator makro tersebut, maka alokasi belanja daerah dapat diterapkan.

Pada APBD Perubahan 2021 jumlah belanja yang memiliki kaitan langsung dengan ke-6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi sebesar Rp0,69 trilyun atau 40,21% dari total pengeluaran daerah. Pada tahun 2022, alokasi belanja yang terkait dengan sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi meningkat secara absolut menjadi Rp0,72 trilyun dan secara relatif 41,01%.

Peningkatan belanja daerah pada tahun 2022 tersebut didorong oleh pandemi Covid-19 yang lebih terkendali dan situasi perekonomian yang semakin membaik. Kondisi Sosial-Ekonomi yang lebih optimis dan anggaran yang lebih besar diharapkan dampaknya terhadap capaian target Indikator Makro dapat lebih tinggi lagi.

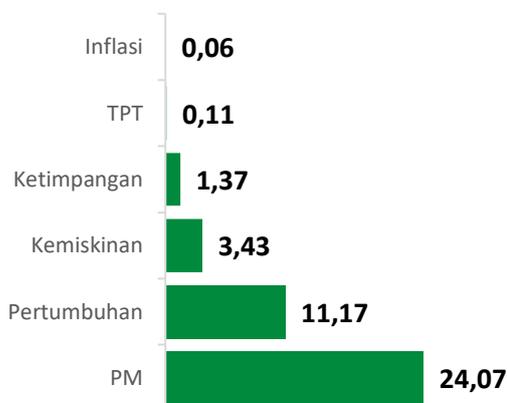


Gambar 4. 1. Belanja APBD Perubahan 2021 dan Alokasi Sasaran Pertumbuhan Ekonomi (Trilyun Rupiah)

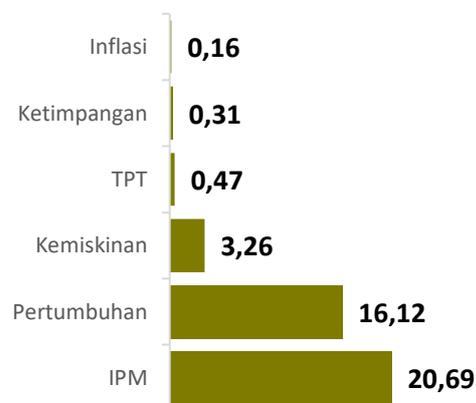


Gambar 4. 2. Belanja APBD Perubahan 2022 dan Alokasi Sasaran Pertumbuhan Ekonomi (Trilyun Rupiah)

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.



Gambar 4.3. Proporsi Belanja Menurut Sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi terhadap Total Belanja APBD Perubahan 2021 (%)



Gambar 4.4. Proporsi Belanja Menurut Sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi terhadap Total Belanja APBD Perubahan 2022 (%)

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

Pola belanja daerah tahun 2021 dan 2022 menurut Indikator Makro Sosial-Ekonomi menempatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai sasaran alokasi paling tinggi, yakni di atas 20% - 24% dari proporsi total pengeluaran APBD. Besarnya alokasi terkait IPM tersebut ditopang oleh belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan yang secara tupoksi sangat berhubungan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Kedua dinas ini juga merupakan OPD yang paling besar belanja daerah dibandingkan OPD lainnya di Kabupaten Tabalong.

Selanjutnya, pola belanja daerah berdasarkan sasaran Indikator Makro tersebut menempatkan Pertumbuhan Ekonomi pada peringkat kedua dengan proporsi 11% - 16%. Berikutnya indikator Tingkat Kemiskinan 3%, Tingkat Ketimpangan 1%, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT 0,11% - 0,31%, dan Inflasi 0,06% - 0,16% dari total belanja daerah.

4.2.1. Crosscutting Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi merefleksikan bagaimana perkembangan dan situasi perekonomian di Kabupaten Tabalong. Semakin baik kondisi perekonomian maka akan semakin tinggi angka tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Begitu pula sebaliknya semakin memburuk perekonomian, Pertumbuhan Ekonomi akan semakin melambat bahkan akhir tumbuh secara negatif sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020.

Baik buruknya kondisi perekonomian tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Karena itu penting sekali Pemerintah Daerah menggunakan perannya melalui APBD untuk mendorong perekonomian berjalan secara lebih baik. Dalam hal ini agar target RPJMD dapat dicapai dan terlampaui.

Pada tahun 2021 target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Kabupaten Tabalong adalah 1,50% - 2,00% sedangkan tahun 2022 sebesar 1,75% - 2,30%. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2021 melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan, yakni sebesar 3,28%.

Alokasi belanja daerah yang terkait dengan sasaran indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 sebesar Rp191,79 milyar atau 11,17% dari Rp1,72 triliun APBD 2021. Pada tahun 2022 alokasinya meningkat menjadi Rp287,60 milyar atau 16,44% dari total belanja daerah Rp1,75 triliun. Kombinasi antara peningkatan belanja yang memiliki relevansi sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan situasi pandemi Covid-19 yang relatif terkendali diharapkan pada tahun 2022 capaian indikator ini diharapkan lebih baik dari tahun 2021.

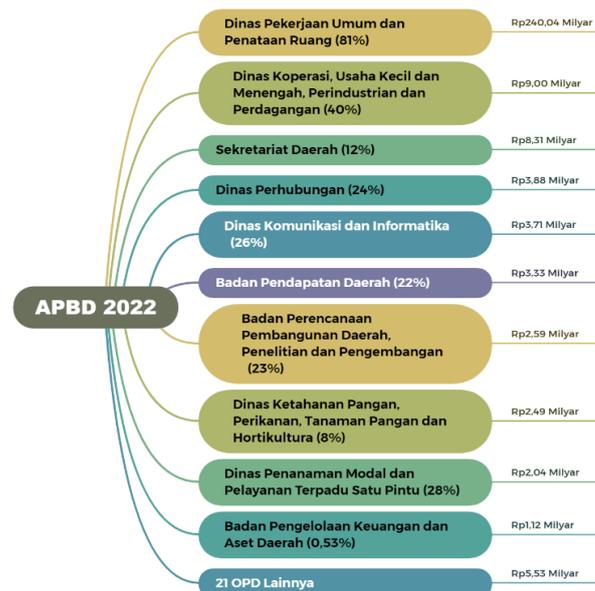
Secara absolut, OPD yang paling besar alokasi belanja terkait sasaran Pertumbuhan Ekonomi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jumlah Rp240,04 milyar atau 85,10% dari seluruh pengeluaran APBD tahun 2022 yang terkait indikator ini. Kemudian diikuti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp9,00 milyar, Sekretariat Daerah Rp8,31 milyar, Dinas Perhubungan Rp3,88 milyar dan Dinas Komunikasi dan Informatika 3,71 milyar. Besarnya peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tupoksi-

nya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan kabupaten.

Secara relatif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalokasikan belanja yang mengenai sasaran Pertumbuhan Ekonomi dalam proporsi yang paling besar dari total anggaran. Nilainya mencapai 81,37%. Kemudian diikuti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar 39,93%, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28,13%, Dinas Komunikasi dan Informatika 26,29% dan Dinas Perhubungan 23,45%.



Gambar 4.5. *Crosscutting* Sasaran Pertumbuhan Ekonomi APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4.6. *Crosscutting* Sasaran Pertumbuhan Ekonomi APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

4.2.2. *Crosscutting* Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja. Sedangkan jumlah Angkatan Kerja itu sendiri merupakan penduduk usia kerja yang terdiri atas penduduk bekerja dan Pengangguran Terbuka.

Crosscutting indikator TPT adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengalokasikan kegiatannya ke dalam APBD yang mengenai sasaran indikator

tersebut secara lintas sektoral. Data APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 menunjukkan besaran anggaran terkait TPT masing-masing senilai Rp1,86 milyar dan Rp8,29 milyar.

Berdasarkan RPJMD Perubahan 2019-2024, Kabupaten Tabalong menargetkan TPT tahun 2021 dan 2022 berada pada level 3,00% - 4,00%. Realisasi TPT tahun 2021 adalah 3,43% sehingga memenuhi target RPJMD. Capaian tahun 2022 sendiri diperkirakan TPT akan menurun dibandingkan tahun 2021 karena membaiknya situasi perekonomian sejak semakin terkendalinya pandemi Covid-19.

Dalam APBD tahun 2022, ada 5 OPD yang program dan kegiatannya terkait TPT. Paling besar adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp5,76 milyar. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Rp1,26 milyar, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Rp0,83 milyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp0,27 milyar, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rp0,17 milyar.

Secara relatif, Dinas Tenaga Kerja memiliki alokasi paling besar dari total anggarannya dalam menyasar target penurunan TPT yaitu 19,57%. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 18,95%, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 5,99%,



Gambar 4.7. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4.8. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

4.2.3. *Crosscutting* Indikator Inflasi

Kota Tanjung adalah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipantau oleh BPS untuk perkembangan tingkat harga dan inflasi. Inflasi sendiri merupakan

gambaran terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Biasanya kenaikan harga-harga kelompok barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dapat memicu terjadinya inflasi.

Inflasi ditinjau dari perekonomian riil direfleksikan oleh melonjaknya permintaan (*demand*) masyarakat terhadap suatu atau banyak komoditi sedangkan penawarannya (*supply*) tidak dapat mengimbangnya. Dengan kata lain, inflasi ini terjadi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*) yang biasanya muncul saat momentum tertentu seperti saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi manakala daya beli masyarakat meningkat karena perekonomian sedang dalam masa ekspansi.

Berikutnya inflasi dari perekonomian riil juga dapat terjadi sebagai akibat naiknya biaya produksi (*cost push inflation*) sehingga produsen dan pedagang menaikkan harga jualnya ke masyarakat. Contohnya adalah kenaikan harga BBM memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik yang berdampak naiknya biaya produksi pada kegiatan ekonomi lain.

Target RPJMD untuk tingkat Inflasi tahunan tahun 2021 adalah 1,58% dan 2022 sebesar 1,42%. Target inflasi 1,58% pada tahun 2021 tidak terpenuhi karena realisasinya lebih tinggi yaitu 2,43%. Inflasi pada tahun tersebut tidak berarti buruk. Hal ini disebabkan ketika perekonomian mulai menjalani pemulihan (*recovery*) di tahun 2021, daya beli masyarakat meningkat sehingga permintaan akan barang dan jasa juga naik. Sebelumnya pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 inflasi rendah bukanlah sinyal bagus. Justru inflasi rendah tersebut terjadi sebagai akibat jatuhnya daya beli masyarakat di masa pandemi.

Kondisi inflasi di tahun 2022 dapat menjadi lebih buruk karena terjadinya kemacetan suplai sembako seperti minyak goreng dan naiknya harga BBM. Kondisi perekonomian yang pada awalnya sedang dalam pemulihan terancam terganggu dengan kenaikan inflasi tersebut. Inflasi kalender Januari-Oktober tahun 2022 sudah mencapai 3,65%, jauh dari target 1,42%.

Crosscutting indikator Inflasi di Kabupaten Tabalong berdasarkan data APBD tahun 2021 dan 2022 hanya melibatkan dua buah OPD. Kedua dinas tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan inflasi, yaitu terkait kelancaran distribusi barang dalam mata rantai perdagangan dan menyangkut memonitor dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan Rp2,15 milyar anggaran yang terkait dengan sasaran indikator Inflasi. Proporsi belanja dengan sasaran indikator ini mencapai 9,52% total anggaran dinas tersebut. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mengalokasikan sebesar Rp0,64 milyar atau sekitar 2,10% dari total anggaran belanjanya.



Gambar 4.9. *Crosscutting* Sasaran Inflasi APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4.10. *Crosscutting* Sasaran Inflasi APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

4.2.4. *Crosscutting* Indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan atau Persentase Penduduk Miskin menggambarkan berapa besar proporsi penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Tabalong. *Crosscutting* indikator Tingkat Kemiskinan memetakan bagaimana intervensi terhadap masalah kemiskinan secara lintas sektoral berdasarkan program dan kegiatan OPD yang terkait.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5,70% dan pada 2022 turun menjadi 5,65%. Sementara realisasi tahun 2021 Persentase Penduduk Miskin sebesar 6,27% dengan jumlah absolut sebanyak 16.128 orang hidup di bawah Garis Kemiskinan. Dibandingkan kondisi tahun 2020 terjadi kenaikan angka kemiskinan dari 5,72% menjadi 6,27%.

Dalam APBD Perubahan 2022, ada 5 OPD yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran indikator Tingkat Kemiskinan. Paling besar anggaran yang menyasar indikator ini berasal dari Dinas Sosial yakni sebesar Rp30,29 milyar. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp8,34 milyar, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Rp8,33 milyar, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp5,11 milyar dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp4,58 milyar.

Sesuai tupoksi-nya Dinas Sosial yang sangat relevan dengan pengentasan kemiskinan, tidak hanya merupakan OPD yang paling besar alokasi anggaran terkait sasaran untuk mencapai target Tingkat Kemiskinan tetapi juga paling besar dari segi rasionya terhadap total belanja. Proporsi alokasi belanja terkait sasaran indikator ini mencapai 80,80%. Kemudian Dinas Permbudayaan Masyarakat dan Desa sebesar 57,77% dan Dinas Perkebunan dan Peternakan 28,51%.



Gambar 4.11. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Kemiskinan APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4.12. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Kemiskinan APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

4.2.5. *Crosscutting* Indikator Ketimpangan

Indikator ketimpangan yang dijadikan sasaran adalah angka Gini Ratio atau Indeks Gini. Indeks Gini di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 sebesar 0,288 memenuhi target RPJMD dan lebih rendah dari kondisi 2020 sebesar 0,346. Dalam RPJM Perubahan, Indeks Gini tahun 2021 ditargetkan 0,305 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,280-0,310.

Crosscutting indikator Ketimpangan merupakan gambaran berapa besar alokasi belanja daerah yang terkait dengan upaya penurunan Tingkat Ketimpangan dan OPD apa saja yang terlibat. Berdasarkan identifikasi hanya ada 2 OPD yang memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan mengurangi gap ketimpangan.

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki anggaran sebesar Rp5,23 milyar dan Dinas Kesehatan Rp0,19 milyar. Masuknya program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke dalam sasaran indikator ini dilatarbelakangi oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memiliki potensi berdampak positif terhadap perekonomian di desa. Jika masyarakat di desa perekonomiannya

menjadi lebih maju maka itu dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di antara penduduk Kabupaten Tabalong.



Gambar 4. 13. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Ketimpangan APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4. 14. *Crosscutting* Sasaran Tingkat Ketimpangan APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

4.2.6. *Crosscutting Indikator Indeks Pembangunan Manusia*

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia sangat bergantung pada usaha untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMD, IPM tahun 2021 ditargetkan 72,88 dan tahun 2022 sebesar 73,60. Realisasi IPM tahun 2021 sebesar 72,60 sehingga target belum tercapai.

Sebenarnya cukup banyak OPD yang terlibat dengan sasaran indikator IPM sebagaimana terlihat pada bagan *Crosscutting* IPM berikut. Pada tahun 2021 dan 2022 ada 10 OPD yang memiliki program dan kegiatan yang dapat memiliki dampak terhadap perbaikan IPM.

Untuk tahun 2022, ada sekitar Rp361,96 milyar alokasi belanja daerah dari 10 OPD yang terhubung dengan sasaran indikator IPM. Paling besar adalah anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp101,24 milyar. Kemudian Dinas Kesehatan Rp99,77 milyar, RS H. Badaruddin Kasim Rp79,21 milyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp38,94 milyar dan Sekretariat Daerah Rp21,63 milyar.

Secara proporsioanal, OPD yang paling besar anggaran belanjanya yang masuk ke sasaran indikator IPM adalah RS H. Badaruddin Kasim 73,06%, kemudian Dinas Kesehatan 60,36%, Dinas Lingkungan Hidup 52,79%, Sekretariat Daerah 31,15% dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24,32%.



Gambar 4.15. *Crosscutting* Sasaran Indeks Pembangunan Manusia APBD 2021 Menurut OPD



Gambar 4. 16. *Crosscutting* Sasaran Indeks Pembangunan Manusia APBD 2022 Menurut OPD

Sumber data: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (2022), diolah.

Usaha untuk mencapai sasaran target Indikator Makro Sosial-Ekonomi dipengaruhi oleh banyak variabel. Peranan fiskal Pemerintah Daerah melalui kebijakan alokasi belanja yang menysar target indikator tersebut adalah salah satu variabel yang dapat didorong. Hanya saja besarnya jumlah rupiah yang dianggarkan dalam APBD belum pasti dapat mengangkat usaha untuk mencapai target. Sebab variabel lain yang juga cukup menentukan adalah kualitas dari belanja daerah itu sendiri.

Pembahasan ini tidak mengulas bagaimana kualitas belanja daerah di Kabupaten Tabalong. Titik tekannya adalah *highlight* pentingnya meningkatkan kualitas belanja tersebut agar manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dan pemerintah dapat dioptimasi di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

4.3. Implikasi

Dalam pencapaian indikator makro sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah diperlukan kerjasama lintas sektor, dari 6 Indikator yang menjadi sasaran indikator makro, indikator pertumbuhan ekonomi yang paling banyak melibatkan OPD

yakni ada 31, dengan volume total belanja terbesar ke 2 yakni sebesar Rp. 282,06 Milyar pada tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 191,79 Milyar.

Indikator Inflasi dan Ketimpangan paling sedikit melibatkan OPD yakni hanya 2 OPD lintas sektor jumlah alokasi belanja terkait indikator inflasi dalam APBD perubahan di tahun 2022 hanya sebesar Rp.2,78 Milyar, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp.1,03 Milyar dan jumlah alokasi belanja untuk ketimpangan sedikit lebih tinggi, tahun 2022 sebesar Rp.5,41 Milyar turun jika dibandingkan tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp.23,59 Milyar

Indikator TPT dan Kemiskinan juga relative sedikit OPD lintas sektor yang terlibat yakni hanya 5 OPD dengan total Alokasi di tahun 2022 sebesar Rp. 8,28 Milyar naik dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp.1,85 Milyar indikator kemiskinan total alokasi sebesar Rp.56,94 Milyar turun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp.58,90 Milyar

Indikator IPM melibatkan OPD lintas sektoral kedua terbesar yakni sebanyak 10 OPD lintas sektoral namun dengan jumlah alokasi anggaran tahun 2022 yang terbesar yakni Rp. 361,96 Milyar yang turun dibandingkan dengan jumlah alokasi tahun 2021 yang sebesar Rp. 413,39 Milyar

Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan OPD lintas sektor di Kabupaten Tabalong adalah suatu kondisi yang nyata adanya, meskipun ada kemungkinan bahwa OPD yang terlibat secara lintas sektor tidak memahami bahwa kegiatan yang mereka rencanakan dan dilaksanakan di OPD mereka, termasuk dalam bagian pencapaian indikator makro yang menjadi kewenangan OPD tertentu, jika semua OPD memahami keterlibatan mereka dalam pencapaian tujuan indikator makro secara bersama-sama dengan OPD lain ini mereka pahami, dan saling bekerjasama dengan baik maka diharapkan capaian indikator makro akan mencapai target yang ditetapkan dari RPJMD dengan lebih ringan karena berbagi beban dengan OPD lintas sektor.

BAB V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Analisis *Crosscutting* pada APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 menghasilkan temuan sekitar 40,21% - 41,01% belanja daerah terkait dengan 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi secara lintas sektor. Alokasi belanja paling paling besar terkait dengan sasaran indikator Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 20,69% - 24,07% dari seluruh belanja daerah. Berikutnya Pertumbuhan Ekonomi sekitar 11,17% hingga 16,12%, Kemiskinan 3,26% - 3,43%, Ketimpangan 0,31% - 1,37%, Tingkat Pengangguran Terbuka 0,11% - 0,47%, dan Inflasi 0,06% - 0,16%.

Indikator Makro Sosial-Ekonomi tahun 2021 yang realisasinya belum mencapai target RPJMD perubahan dialami oleh indikator dengan sasaran alokasi belanja daerah yang kecil maupun besar. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target RPJMD adalah Inflasi dan Persentase Penduduk Miskin. Alokasi anggaran terkait kedua indikator tersebut untuk tahun 2021 sebesar 0,06% dan 3,43% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi pengeluaran terkait IPM sebanyak 24,07% tetapi belum dapat mencapai target RPJMD untuk tahun 2021.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis *Crosscutting* tersebut perlu didorong alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk sasaran indikator Kemiskinan dan Inflasi, termasuk TPT dan Ketimpangan. Hal ini di samping alokasinya terlalu kecil juga kedua indikator tersebut saling terkait. Jika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat khususnya lapisan menengah ke bawah sehingga akan lebih banyak warga yang jatuh miskin. Terlebih angka inflasi tahun 2022 cukup tinggi dan tahun 2023 dapat lebih besar lagi.

Untuk sasaran indikator makro lainnya yang perlu di-manage adalah peningkatan pada kualitas belanja daerah. Hal ini terutama karena alokasi belanja yang terkait sasaran indikator IPM dan Pertumbuhan Ekonomi sudah cukup besar jadi pemilahan alokasi yang lebih berdampak sangat diperlukan. Misalnya sebagian besar belanja daerah yang menysar Pertumbuhan Ekonomi adalah terkait pembangunan infrastruktur. Dari sisi dampak, hasil pembangunan infrastruktur akan lebih terasa dalam jangka menengah dan panjang (*long-run*) manfaatnya bagi Pertumbuhan Ekonomi. Perlu didesain juga kebijakan belanja yang dapat memicu perekonomian dalam jangka pendek (*short run*).

REFERENSI

- Anonim, 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Anonim, 2022. In finance what is Crosscutting?. Diunduh dari https://www.answers.com/Q/In_finance_what_is_Crosscutting.
- Anonim, 2022. National Invasive Species Council (NISC) Crosscut Budget – FY 2022. Diunduh dari <https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/final-9-14-2022-nisc-2022-crosscut-budget-report.pdf>
- Connell, Andrew. 2019. How can governments improve Crosscutting working?. Diunduh dari <https://www.wcpp.org.uk/commentary/how-can-governments-improve-Crosscutting-working/>
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan Jakarta: Toko Gunung Agung*.